

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbagai kelembagaan kemitraan telah dikembangkan pada komoditas pertanian, namun sebagian besar belum menunjukkan kinerja optimal, kecuali pada sebagian komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit. Keberhasilan komoditas ini, disebabkan oleh beberapa factor, antara lain adalah komoditas ini memiliki pasar yang luas, dan adanya pengembangan pabrik pengolahan (Erwidodo, 1995).

Ada beberapa kelembagaan kemitraan yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat, seperti pola PIR - BUN. Pola ini pada awalnya merupakan strategi dan upaya pengintegrasian struktur usaha perkebunan besar dan perkebunan rakyat (petani kecil), yang disebut Nucleus Estate Smallholder (NES). Kemudian istilah tersebut berubah menjadi Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN), dan disusul PIR-Transmigrasi. Dalam SK Mentan No.940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dikemukakan tentang pola-pola kemitraan usaha yang dapat dilaksanakan, antara lain pola: (1) pola inti-plasma, (2) pola kemitraan sub-kontrak, (3) pola dagang umum,(4) pola kemitraan keagenan, dan (5) bentuk lain seperti : pola kerjasama operasional agribisnis (KOA).

Pola inti plasma merupakan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksi. PIR-BUN adalah

bentuk pengusahaan perkebunan dimana perusahaan bermodal besar dan memiliki sistem manajemen yang mapan. Perusahaan mitra ini sebagai inti yang fungsinya membantu dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma (Mudiyono, 2006). Antara inti dan plasma diharapkan terjalin kerjasama yang saling menuntungkan, utuh dan berkesinambungan.

Damanhuri (1981, yang disitir Arifin, dkk (2006), menyatakan bawa system subkontrak adalah suatu tata kerja dalam dunia usaha, dimana pihak pertama menawarkan subkontrak (parent firm), meminta pihak kedua (subkontraktor) untuk mengerjakan sebagian atau keseluruhan pekerjaan yang diterimanya dari pihak ketiga. Subkontrak mempunyai implikasi yang bisa merugikan petani yakni hilangnya kebebasan petani dalam memproduksi, produsen semakin terisolir dari pasar, dan menimbulkan ketergantungan petani terhadap principal (Arifin dkk, 2006, Sutawi 2008, Sumadjo, dkk, 2004).

Pola kemitraan dagang umum merupakan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra, atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra (Sutawi,2008). Pada dasarnya pola kelembagaan kemitraan ini adalah jual beli.

Pola keagenan merupakan bentuk kelembagaan kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau petani. Pihak pengusaha mitra (perusahaan besar) memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh perusahaan besar mitra. Para Pihak-pihak yang bermitra terdapat kesempatan tentang target-target

yang harus dicapai dan besarnya fee atau komisi yang diterima oleh pihak yang memasarkan produk.

Pada pola kerjasama operasional agribisnis (KOA), kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian (Sutawi, 2008).

Pada dasarnya kelembagaan kemitraan dengan segala ragamnya merupakan pertanian kontrak (*Contract Farming*). Secara garis besar, *contract farming* paling sedikit terdiri dari lima model, tergantung pada jenis produk, sumberdaya mitra, dan intensitas hubungan kepentingan antara petani dengan pihak mitra Eaton dan Shepherd (2001), dalam karyanya *Contract Farming : Partnership for Growth*, lima pola adalah : (1) *centralized model*, (2) *nucleus estate model*, (3) *multipartite model*, (4) *informal model*, (5) *intermediary model*. Sementara itu, untuk kasus pertanian di Indonesia, Kasyno dkk. (1994) yang disitir oleh Saptana dkk. (2005) mengemukakan bahwa manajemen pertanian kontrak atau disebut dengan istilah “kemitraan” terdiri dari tiga pola yaitu; (1) kemitraan yang berkembang mengikuti jalur evolusi sosio-budaya atau ekonomi tradisi, (2) kemitraan program pemerintah yang dikaitkan dengan intensifikasi pertanian, (3) kemitraan yang tumbuh akibat perkembangan ekonomi pasar.

Kelembagaan kemitraan usaha telah diterapkan pemerintah dalam pembangunan perkebunan, yang bertujuan agar semua pihak yang terlibat di dalamnya sama-sama memiliki manfaat. Dalam kenyataannya, tidaklah semudah perencanaan, bahkan kemitraan yang melibatkan pemerintah justru menambah

kesulitan dan menimbulkan distorsi (Raharjo, 1990). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Syahyuti (2004), dimana peran pemerintah yang terlalu dominan dalam kemitraan justru akan menghasilkan iklim yang kurang baik. Sebaliknya kemitraan yang terbentuk dengan sendirinya, khususnya di daerah sentra produksi pertanian dianggap lebih berhasil. Hal ini disebabkan oleh adanya ketergantungan dan kebutuhan bersama.

Pada umumnya teori/kajian tentang kelembagaan kemitraan membahas hubungan antara petani atau kelompok tani dan perusahaan mitra, Uphoff (1986), North (1990), Dogo, dkk (2003), Saptana (2006), Syahyuti (2004), Valerina, dkk (2006), Elizabeth (2005), Hermanto (2007).

Namun demikian kelembagaan kemitraan usaha kebun milik desa dan perusahaan mitra belum banyak dikaji. Pada hal, saat ini usaha milik desa sudah mulai bertumbuh kembang dengan pesat diberbagai desa. Usaha kebun milik desa sebagaimana diharapkan sebagai usaha desa memiliki potensi besar untuk ; memberikan sumber pendapatan asli desa,dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa, mendorong,menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa, memberikan dan meningkatkan penghasilan tetap bagi aparat desa guna meningkatkan prestasi kerja dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna, merupakan contoh bagi masyarakat bagaimana mengolah lahan pertanian/perkebunan yang sesuai dengan syarat-syarat teknis di bidang pertanian/perkebunan, direalisasikan melalui peningkatan pendapatan dan kekayaan desa.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam system agraria di pulau jawa lahan garapan milik desa dikenal dengan istilah Tanah bengkok, tanah bengkok tidak dapat diperjual belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Menurut Soedjero (2001), Soedjito (1994) menyatakan bahwa penggunaan, tanah bengkok dibagi menjadi dua kelompok ; (1) Tanah lungguh, menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima. (2) Tanah kas desa, dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa

Di kabupaten Mukomuko juga kita jumpai tanah desa, namun tidak dikelola dan diperuntukkan untuk pamong desa, melainkan sebagai usaha perkebunan desa yang dikenal dengan istilah kebun masyarakat desa (KMD). Kebun Masyarakat Desa dibangun sejak wilayah ini merupakan bagian dari kabupaten Bengkulu Utara. Kebun ini dibangun oleh perusahaan Mitra yakni PT. Agromuko. Tanah desa ini merupakan hutan desa, yang merupakan hutan yang terletak diantara desa–desa, ataupun berbatasan dengan tanah/hutan negara. Sebelum masuknya program transmigrasi dan pembangunan perkebunan oleh perusahaan–perusahaan besar nasional dan penanam modal asing (PMA), desa–desa memiliki hutan yang luas. Desa–desa memiliki sumber pendapatan dari hasil hutan (bungo kayu ataupun ikutan lainnya), desa memiliki hak untuk mengatur diri sendiri. Dengan diterbitnya undang- undang nomor 5 tahun 1979, yang menempatkan desa sebagai unit pemerintahan terendah dibawah camat, berdampak menghilangkan self-governing community. Desa yang tadinya

memiliki kekuasaan terhadap hutan, hilang dan tak memiliki daya lagi. Hutan yang dikuasai desa hanya terbatas dilingkup antar desa. Hutan sisa-sisa pemanfaatan dan penguasaan dan milik masyarakat yang terletak diantara desa inilah yang dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat untuk dijadikan kebun kas masyarakat desa (KMD).

Sejak tahun 2010 telah dibangun 38 kebun masyarakat desa, diantaranya 34 kebun kas masyarakat desa telah berproduksi. Kebun kelapa sawit kas masyarakat desa yang telah berproduksi ini oleh perusahaan mitra diserahkan pengelolaannya kepada *kepanitiaan* desa, atau koperasi kepada desa. Sebagai sebuah bentuk kemitraan baru, antara perusahaan dengan desa, bentuk kemitraan ini berpotensi menjadi sebuah kemitraan yang *sustainable*, selain itu berpotensi melahirkan konflik. Secara internal banyak desa yang belum memiliki aturan main yang jelas, bagaimana kemitraan ini dikelola, banyak perbedaan pandangan antar desa dengan perusahaan mitra. Ada desa memiliki pandangan bahwa Pembangunan kebun kas ini adalah sebagai kewajiban perusahaan yang beroperasi diwilayahnya, ada juga yang berpandangan ini adalah bentuk kepedulian perusahaan dan yang lainnya menyatakan bahwa kebun kas masyarakat desa adalah merupakan cara perusahaan untuk menghindari masyarakat ataupun organisasi-organisasi desa yang meminta-minta bantuan ke perusahaan.

Dari paparan diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana model kelembagaan kemitraan yang sudah ada pada usaha perkebunan masyarakat desa (KMD) di Kabupaten Mukomuko

2. Bagaimana kelemahan dan kekuatan lembaga yang sudah ada dalam kaitannya dengan pengembangan usaha kebun kelapa sawit desa di Kabupaten Mukomuko
3. Bagaimana rumusan model kelembagaan kemitraan yang efektif dan berkelanjutan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi model - model kelembagaan kemitraan yang sudah ada pada kebun masyarakat desa.
2. Untuk menganalisis faktor- faktor kelemahan dan kekuatan lembaga ada dalam kaitannya terhadap pengembangan usaha kebun sawit desa.
3. Merumuskan model kelembagaan kemitraan kebun masyarakat desa yang efektif dan berkelanjutan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian disertasi ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dalam pembangunan desa khususnya pembangunan usaha desa. Dari segi teoritis disertasi ini diharapkan memberikan kontribusi dalam perancangan model kelembagaan dan kemitraan usaha kebun kelapa sawit masyarakat desa.

X. KESIMPULAN DAN SARAN

0.1. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan yang ingin diharapkan dalam penelitian ini dari berbagai analisis yang telah dikemukakan sebelumnya maka secara umum dapat disimpulkan bahwa kelembagaan kemitraan yang efektif dan berkelanjutan pada model kelembagaan kemitraan usaha kebun kelapa sawit belum terwujud dengan baik. Hal ini dapat disimpulkan dibawah kelembagaan kemitraan usaha kebun kelapa sawit desa teridentifikasi dalam dua bentuk pengelolaan yakni model kepanitian desa dan model koperasi. Kedua model ini memiliki kareteristik faktor eksogen yang sama. Pelaksanaan pengelolaan kelembagaan kemitraan usaha kebun kelapa sawi desa peranan kelembagaan lokal cukup besar.

Pada dasarnya prinsip Ostrom dapat di terapkan dalam kelembagaan kemitraan usaha kebun kelapa sawit kas desa. Hal ini buktikan dalam dianalisis dengan prinsip-prinsi desain Ostrom 1990, diperoleh kelemahan dan kekuatan kelembagaan kemitraan kebun kelapa sawit desa sebagai berikut:

- a. Prinsip pengelolaan pertama yang menjadi kekuatan adalah adanya pengakuan atas hak pengelolaan dimana keberadaan Kebun Kelapa Sawit kas masyarakat Desa diakui aparat desa, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- b. Prinsip pengeloaan lain yang juga berperan adalah Kesepakatan bersama atau *collective choice* dimana para pelaku secara kolektif memberlakukan aturan dengan pola saling percaya,.

- c. Aturan main pengelolaan berlandaskan norma masyarakat setempat dan mengutamakan fungsi fisik sosial dan ekonomi,
- d. Prinsip yang kurang mendapat perhatian atau penanganan yang layak yang merupakan kelemahan diantara pihak pengelola adalah prinsip yang berkaitan:

- Prinsip Monitoring, kurangnya laporan–laporan pelaksanaan dan laporan pemantauan.
- Prinsip : sanksi berkala, bahwa sanksi tidak diterapkan atau ditindaklanjuti terhadap pelanggaran.
- Prinsip Mekanisme Penyelesaian konflik bahwa pembiaran pelanggaran berkembang menjadi isu spekulatif dan konflik.

Kelembagaan kemitraan usaha kebun kelapa sawit desa yang efektif dan berkelanjutan belum terwujud dengan baik, hal ini ditunjukkan belum adanya kejelasan yang mengatur jaminan hak dan kewajiban para aktor-aktor kemitraan dalam arena aksi yang dilakukan. Kelembagaan kemitraan lebih mengandalkan kepercayaan (*trust*) dan nilai-nilai kebersamaan. Hal ini tercermin siapa berbuat apa dalam arena aksi para aktor–aktor dilapangan.

10.2. Implikasi Hasil Penelitian

1. Outcome bahwa kelembagaan kemitraan sebagai sebuah usaha pengelolaan sumberdaya bersama yang berorientasi kepada benefit belum menggambarkan jaringan (*network*) antar aktor-aktor dalam arena aksinya. Disamping itu masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kelembagaan kemitraan, maka disarankan agar kelembagaan kemitraan usaha kelapa sawit desa yang ada

disempurnakan dalam bentuk tata kelola bersama (*Co-management*), yang diformulasikan dalam suatu bentuk kontrak yang mengatur keseimbangan hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan (*enforcable contract*) yang dipakai secara sukarela oleh para aktor.

2. Implementasi dari segi teoritis, Dalam kelembagaan kemitraan usaha kebun kebun kelapa sawit desa yang efektif dan berkelanjutan. Penggunaan prinsip-prinsip desain Ostrom masih mengalami kelemahan, perlu penyesuaian dengan kondisi sumberdaya bersama yang ada. Sehingga faktor koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya milik bersama (*common pool resources*) dapat efektif dan berkesinambungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhiwardana, Edoardus Satya, Dalyono, 2013, Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Perusahaan. *Dipenogoro Journal of Accounting*, Volume 2 nomor 2.
- Adhuri, Dedy, S.2002. Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. *Antropologi Indonesia*, 68.
- Agriwal, Arun. 2003. Sustainable Governance Of Common-Pool Resources: Context, Methods, And Politics. *Annu.Rev.Anthropol* 32: 243-262
- Anonim. 1995. Undang-Undang nonor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. : <http://kukm.mweb.co.id/peraturan/uu-9-1995.htm>.
- 1997a. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. Jakarta.
- 1997b. SK.Mentan No. 940/Kpts/OT.210/10/1997. Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- 2005. Sejarah dan Adat Istiadat Kabupaten Mukomuko. Bappeda Kabupaten Mukomuko. Mukomuko.
- 2006. Perda Kabupaten Mukomuko. Tentang Desa. Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Mukomuko.
- 2008. Adat Hukum dan Seni Budaya Kabupaten Mukomuko. Badan Musyawarah Adat Kabupaten Mukomuko. Mukomuko.
- 2009. Perkembangan luas,produksi, komodity Perkebunan Kabupaten Mukomuko. Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan Kabupaten Mukomuko Tahun 2009. Mukomuko.
- 2010. Radar Mukomuko, Tanggal 8 Juni 2010. Mukomuko.
- 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Dedagri. Jakarta.
- 2011a. Departemen Pertanian. Produksi Sawit. [http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20298473-T30275-Penerapan kerangka.Pdf](http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/20298473-T30275-Penerapan_kerangka.Pdf).

- , 2011b. Perkembangan Produksi Perkebunan. Departemen Pertanian. Jakarta
- , 2011c. Peraturan Bupati Mukomuko Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Mukomuko.
- Afrizal dan Indrizal, Edy, 2010. Manajemen Konflik Perkebunan Kelapa Sawit: Panduan Mekanisme Berdasarkan FPIC (Free and Prior Informed Consent) Alih Fungsi Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Guna Meminimalisasi Konflik, Andalas University Press. Padang.
- Afrizal. 2006. Sosiologi Konflik Agraria: Protes – Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer. Andalas University Press, Padang.
- , 2013, Negara dan Konflik Agraria: Studi Kasus Pada Komunitas Pusat Perkebunan Kelapa Sawit Berskala Besar di Sumatra Barat ; http.
- Agus, Setiyanto, 2001, Elite Pribumi Bengkulu, Balai Pustaka, Jakarta.
- Arifin, B, 2004. Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Arifin Bontor S, et.all. 2006. Hubungan Subkontrak antara Partonun dengan Toke :21. Jurnal Studi Pembangunan. Vol 1. Nomor. 2. Hal. 12 – 21. Medan.
- Arif Satria, 2011. Menuju Desa 2030. Crestpent Press. Bogor.
- Ardi Hadi Dharmawan. 2007/2008. Pendekatan-pendekatan Pembangunan Perdesaan dan Pertanian Klasik dan Kontemporer. [Http//w.w.w.psb3ipb.or.id/upload/Teori-Teori+pembangunan+kontemporer](http://w.w.w.psb3ipb.or.id/upload/Teori-Teori+pembangunan+kontemporer).
- Arsiyah,.et-al, 2009. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. Wacana vol.12 No.2 : 370375.
- Bachriadi , D dan Sardjono, MA. 2006. Local Intiatives to Return Communities Control Over Forest Lands In Indonesia: Conversion or Occupation. Paper at the Confrence Name/Retrieved accesDate From URL.
- Bachrein, Saeful. 2010. Pendekatan Desa Membangun Di Jawa Barat: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan (Developing Village Approach in West Java: Rural development Policy and Strategy. Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8 No. 2 Juni 2010: 133-149.

- Baga, Lukman M. 2005. Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani Untuk Revitalisasi Pertanian. Makalah” Revitalisasi Pertanian untuk Kesejahteraan Bangsa (MITI). Jakarta.
- Baron, Cheryll A. 2000. “High Tech’s Missionaries of Sloppiness.” *Salon.com* (December 6).
http://dir.salon.com/tech/feature/2000/12/06/bad_computers/index.html
- Benny, Rachman. 2009. Kebijakan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Irigasi : Kasus Propinsi Banten. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 7 No. 1 Maret 2009: 1-19.
- Bhim Adhikari. dkk. 2001. Property Right and Natural Resources : Impact of Common Property Institutions on Community –Based Resource Management. Rio de Janeriro Barazil.
- Blomquist, William,1992, *Dividing the Waters: Governing Groundwater in Southern California*. San Francisco, CA: ICS Press
- Bryson Jonh M. *Strategic Planning For Public and Nonprofit Organizations*:Alih Bahasa M. Miftahuddin (Perencanaan Stategis bagi Organisasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Cahyono, Sandy, 2012. Peranan Kelembagaan Petani Dalam Mendukung Keberlanjutan Pertanian Sebagai Basis Pengembangan Ekonomi Lokal, Sekolah Arsitektur,Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan,ITB. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V2N1*. Bandung.
- Cohen dan Prusak. 2001. In *Godd Company, How Social Capital Makes Organization Work*, Boston, Havard Business School Press.
- Dharmawan Arya Hadi. 2006. Pendekatan -Pendekatan Pengembangan Pedesaan dan Pertanian : Klasik dan Kontemporer. Makalah “ Apresiasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Daerah Bagi Tenaga Pemandu Teknologi Mendukung Prima Tani” Bogor.
- Draja, Bambang .2007 *dinamika Lingkungan Nasional dan Global Perkebunan : Implikasi Strategis Bagi Pembangunan Perkebunan :*
<http://www.pustaka-deptan.go.id/publikasi/wr264042.pdf>.
- 2009. *Kinerja Subsektor Perkebunan: Evaluasi Masa Lalu (1994-1998) dan Prospek Pada Era Perdagangan Bebas Dunia (2003 – 2008) :* <http://www.pustaka-deptan.go.id/publikasi/wr264045.pdf>.

- Dimiyanti, A., dkk, 1991, Sumbangan Pemikiran Bagi Pembangunan Pertanian di Irian Jaya, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta.
- Djogo, dkk. 2003. Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestry. World Agroforestry Center (ICRAF). Bogor.
- Dwi Kartini. 2008. Corporate Sosial Responsibility: transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia Refika Aditama. Bandung.
- D'Silva, Jeffrey Lawrence, et.al. 2009. A Review of Contract Farming and Factors that Impinge Youths Acceptance to Contract Farming. European Journal of Social Sciences Vol. 11, Number 2: 328-338
- Eaton and Shepherd. 2001. Contract Farming Partnerships for Growth. FAO Agricultural Services Bulletin 145. Roma.
- Murdiyanto, Eko dan Muhammad Kundarto. 2012. Membangun Kemitraan Agribisnis: Inovasi Program Corporate Sosial Responsibility. Yayasan Bina Kartalestari. Semarang.
- Elfindri. Dkk. 2008. Strategi Sukses Membangun Daerah. Gorga Media.
- Elizabeth, Rosgandha. 2005, Diagnosa Kemarjinalan Kelembagaan Lokal Untuk Menunjang Perekonomian Rakyat di Pedesaan, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang Departemen Pertanian, Bogor.
- , 2007, Penguatan dan Pemberdayaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- , 2008. Partisipasi sebagai Strategi Pemberdayaan Petani Miskin melalui Program Integrasi Jagung dan Ternak. [http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/\(8\)%20soca-roosgandha-integrasi%20jagung-ternak\(1\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(8)%20soca-roosgandha-integrasi%20jagung-ternak(1).pdf)
- Elizabeth, Roosganda dan Iwan Setiajie Anugrah. 2009. Sistem Kelembagaan Komunitas Petani Sayuran di Desa Baturiti, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/MKP_B6.pdf
- Erwidodo. 1995. Transformasi Struktural dan Industrialisasi Pertanian dalam Prosiding Agribisnis: Peluang dan Tantangan Agribisnis Perkebunan, Peternakan dan Pribanan, Pusat Penelitian Sosial

Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian .
Bogor..

- Erfit. 2010. Pengembangan Pola Kemitraan Pada Agribisnis Holtikultural. Program Pascasarjana Unand (tidak dipublikasikan). Padang.
- Etzoni,A. 1985. Organisasi- organisasi Modern.UI.Press & Pustaka Bradjaguna.Jakarta.
- Fatah, Luthfi. 2006. Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Banjarbaru: Pustaka Banua.
- Fadjar Undang. 2006. Kemitraan Usaha Perkebunan : Perubahan Struktur yang belum Lengkap. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 24 No.1, Hal.46-60.
- Fear, F. A and Schwarzweller, H.K. 1985. Introduction: Rural Sociology, Community and Community Development, *in* Fear, F. A and Schwarzweller, H. K. (*eds.*). 1985.
- Gammahendra, Fianda, dkk, 2014, Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi (Studi Pada Persepsi Pegawai Terhadap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.7, No. 2 Januari 2014.
- Gibson, et.al. 2002. Organisasi dan Manajemen –Prilaku Struktur dan Proses, edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.
- Giddens, Anthony. 2002. Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hacker, H. 1999. Empowerment Projects for and by Woman: Summary of Pilot Study.DED Yaounde. (Unpublished).
- Haji Abdullah Sidik.1996. Sejarah Bengkulu 1500 -1990. Balai Pustaka. Jakarta.
- Hafsah, Muhammad Jafar.1999. Kemitraan Usaha. Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Hanna, S. and M. Munasinghe (1995) “ An Introduction to Property Rights and the Environment”. In S. Hanna and M. Munasinghe (eds.) Property Rights and the Environment: Social and Ecological Issues. The Beijer International Institute of Ecological Economics and The World Bank.
- Hardin,Garret, 1968. The Tragedy of Commons, Science, 162 (3859): 1243 – 1248.

- Hariri Afwan. 2008. Prospek Pengembangan Unit Pengelola Keuangan Menjadi Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Aplikasi Manajemen Malang* Vol 7 no.1 :42-52
- Hartono, Nono (?).Penguatan Kelembagaan Petani Dalam Pemanfaatan Air Irigasi Dalam Pengembangan Agribisnis: (Studi Kasus Di Kabupaten Tasikmalaya). <http://psdal.lp3es.or.id/kajian1.html>.
- Hasbi.2001. Rekayasa Sistem Kemitraaan Usaha Pola Mini Agroindustri Kelapa Sawit. Desertasi, PPS IPB. Bogor (tidak dipublikasi).
- Hastuti,and White. 1979. Bentuk-Bentuk Kerjasama Ekonomi Skala Kecil di Enam Desa Contoh di Daerah Aliran Sungai Cimanuk, Jawa Barat. *Rural Dynamic Series No. 9, Agro Economic Survey. Ryral Dynamic Study, Bogor.*
- Hayami, Yujiro dan Masaro Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Hermanto R. 2007. Rancangan Kelembagaan Tani Dalam Implementasi Prima Tani Di Sumatera Selatan. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 5 No. 2, Juni 2007. Hal 110-124.
- Hidayaturrehman. 2000. Petani Lokal dan Kapitalisme (Studi Respon Petani Lokal Terhadap Kebijakan Pertanian Di Desa Nungga dan Desa Maria Kabupaten Bima); *jurnal Administrasi Negara* vol 1 No 1. September 2000: 72 -87.
- ICLARM dan NSC, 1996. *Analysis Of Fisheries Co- Management Arrangement: A Research Framework*. Prepared by Fisheries Co- Management Project Core Staff at the ICLARM and North Sea Center.
- Ikin Sadikin dan Rudi Irawan.2005. Dampak Pembangunan Perkebunan Karet Rakyat Terhadap Kehidupan Petani di Riau; [http://ejournal.unud.ac.id/abstrak\(5\)soca-ikin-sadikin-dampak+pembangunan+perkebunan](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak(5)soca-ikin-sadikin-dampak+pembangunan+perkebunan)
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Concept and Implementation Of Participation And Empowerment: Reflection From The Coffee IPM-SECP*. Makara, *Sosial Humaniora*, Vol. 11, No. 2, Desember 2007: 58-70
- Impreal Mark T and Yandle Tracy. 2005. *Taking Institutions Seriously : Using the IAD Framework to Analyze Fisheries Policy*. Taylor & Francis Inc.
- Israel, Aruro.1990. *Pengembangan Kelembagaan : Pengalaman Proyek-proyek Bank Dunia*. LP3ES. Jakarta

- Jamal Erizal 2009. Membangun Momentum Baru Pembangunan Perdesaan Di Indonesia; [http//w.w.w.pustaka-deptan.go.id/publikasi/p3281092.pdf](http://w.w.w.pustaka-deptan.go.id/publikasi/p3281092.pdf).
- Jamal, Erizal, dkk, 2000, Dinamika Inovasi Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pertanian.PSE. Bogor..
- Kadir, Abdul, 2008. Sejarah Mukomuko dan Hubungannya dengan Kerajaan Minang Kabau di Pagaruyung. BMA Kabupaten Mukomuko. Mukomuko.
- Kartodirdjo, Sastro, 1991, Modern Indonesia: Tradition & Transformation: A Socio-Historical Perspective.Gajah Mada Univerity Press, Yogyakarta.
- Kasih, Yulizar, 2008. Rekonstruksi Model Lembaga Keuangan Untuk Usaha Tani Kecil (Studi Kasus Lembaga Keuangan di Pedesaan Sumatra Barat) Desertasi Program Pascasarjana Unand. Padang.
- Khudori. 2010.” Cultuurstelsel “ Baru. KOMPAS senin 1 Februari 2010.
- Ki Agoes Hoesien.1938. Koempoelan oendang-oendang Adat Lembaga dari Sebilan Onder of Deelingen Dalam Gewest Bengkoelen. Diterbit ulang Penerbit Sriwijaya Media Utama 1993. Palembang.
- Koentjaraningrat. 1982. Masalah – Masalah Pembangunan : Bunga Rampai Antropologi Terapan. LP3ES. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1997. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Koontz Tomas. M. 2003. An Introduction to the Institutional Analysis and Development (IAD) Framework for Forest Management ResearchPaper prepared for “First Nations and Sustainable Forestry: Institutional Conditions for Success,”workshop, University of British Columbia Faculty of Forestry, Vancouver, B.C.
- Kurniawan Teguh. 2008. Perspektif Kelembagaan dalam Strategi Pembangunan Wilayah Di Indonesia. Seminar Sebumi: 24-25 Juni 2008. UI. Jakarta.
- Mahdi. 2007. Upland People’s Livelihood changes Under Changing of Governace and Socio Biophysical of Natural Resource : Case of Batang Lembang Watersheed. West Sumatra Indonesia. In

N.T.Lam.N.T.T.Ha.D.T.H.Van,V.T.Thao,T.D & T. Mckinly (Eds)
Proceeding of Regional Conference on Environmental Planning And
Management in Southeast Asian Countries Hanoi, Vietnam,Nha
Xuat Ban Nong Nghiep.

-----, 2008. Local Respon to Changing Contexts Of Natural Resources
Management: Case Study At Lembang Sub-Watershed Of West
Sumatra, Indonesia, Unpublished Dessertation, Asian Institute Of
Tehnology (AIT). Bangkok.

Mahdi,. Et.al .2009. livelihood Change and Livelihod Sustainabily In The
Uplands Of Lembang Subwatershed, West Sumatra, Indonesia, In A
Changing Natural Resources Management Context. Environmental
Management, 43(1) 84 -99.

Maryunani. 2006. Perspektif Pengelolaan Keuangan Dan Ekonomi Desa. Makalah
Serasehan Nasional “ Menggagas Desa Masa Depan” Ditjen PMD
Depdagri. 3-4 Juli 2006.

Martius Endry. 2008. Kemitraan Agribisnis Untuk Memberdaykan Ekonomi
Rakyat: Jurnal Agribisnis Kerayatan. Volume 1, Nomor 1. Hal 1-11.
Padang.

Martial. 2010. Penataan Kelembagaan Penguasaan Lahan dan Pohon Pada Sistem
Agroforestri di Sumatra Barat. Desertasi. Program Doktor
Pascasarjana Universitas Andalas. Padang

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi.1989. Metode Penelitian Survei.LP3ES,
Jakarta.

Milton, J.Esman,. 1986. Unsur-unsur Dari Pembangunan Lembaga, dari
Institutions Building, Joseph.W.eaton, Pembangunan Lembaga dan
Pembangunan Nasional dari Konsep ke aplikasi, Terjemahan Gurino
dan Aldi Jeni, Ui Press. Jakarta.

Mosher, AT. 1966. *Getting Agriculture Moving*. Dalam Krisnandhi dan Bahrin
Samad. Penyadur.Menggerakkan dan Membangun Pertanian.
Jakarta: PT Yasaguna.

Mudiyono. 2006. Petani Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perspektif
Pengembangan Komunitas. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol.10.
No.1 Juli 2006 (35-50).

Muhammad Iqbal,Edi Basuno, dan Gelar Satya Budhi, 2007. Esensi dan Urgensi
kaji Tindak Partisipasif dalam Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan

Berbasis Sumberdaya Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi
(Vol: 25) . Bogor.

- Mujiono, 2006, Petani Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perspektif Pengembangan Komunitas: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 10, No.1. hal 35-50. Yogyakarta.
- Muni Fuady, 1997. Pembiayaan perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis). PT. Citra Aditya Bakhti.
- Mulekom, LV, 1999, An Institutional Development Process in Community Based Coastal Resources Management: Building the Capacity and Opportunity For Community Based Co-management in A Small-Scale Fisheries Community. *Ocean & Coastal Management* 42 (1999) 439-456.
- Muslimin Nasution, 2002, Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan Untuk Agroindustri. IPB Press. Bogor.
- Nasution, Z. dan E. Dharyati. 1999. Dampak Lelang Perairan Terhadap Ekonomi Nelayan di Sungai Lempuing , Sumatra Selatan, Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan. Sekolah Tinggi Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
- Nasution, Z. dkk. 2002. Pengelolaan Suaka Perikanan yang di Kelola dengan Dominasi Pemerintah dan Ko Manajemen. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*. Pusat Riset Pengelolaan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. BRKP. DKP. Jakarta.
- Noer, Melinda, 2006. Pembangunan Berbasis Kelembagaan Adat: Sebuah Alternatif Pembelajaran dari Kasus Kinerja Kelembagaan Nagari Dalam Perencanaan Wilayah Di Propinsi Sumatra Barat. *Mimbar* Volume XXII No.2 April –Juni 2006: 234 -257.
- 2008. Peranan Kelembagaan Lokal Dalam Perencanaan Wilayah Desentralistis Kasus Studi: Perencanaan Berbasis Nagari di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatra Barat. *Desertasi*. ITB. Bandung.
- North. Douglass C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.
- Notohadikusumo, Tejoyuwono. 2006. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Dalam Konteks globalisasi dan Demokratisasi Ekonomi. Makalah Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia. Repo: Ilmu Tanah UGM.

- Nursidah et.all. 2012. Pengembangan Institusi Untuk Membangun Aksi Kolektif Lokal dalam Pengelolaan Hutan Kawasan Lindung SWP Das Arau, Sumatra Barat. JMHT Vol.XVIII: 18 -30, April 2012.
- Nuryanti Sri. 2003. Pemberdayaan Petani Dengan Model Cooperative Farming. Analisis Kebijakan Pertanian Vo.3 no.2 Juni 2005.Bogor Hal 152 - 158. 6 No.1 Juni 2004. Surabaya. Hal 47-66.
- Nurwianto Eko dan Nasution Arman H. 2004. Perumusan Strategi Kemitraan Menggunakan Metode AHP dan SWOT (studi kasus pada Mitra PT. INKA dengan Industri Kecil Menengah di Wilayah Karesidenan Madiun). Jurnal Teknik Industri Vol.
- Ostrom,E. 1986. An Agenda for The Study of Institutions. Public Choice 48: 3-25.
- , 1990. Governing The Commons; The Evolution of Institutions for Collective Action. New York. Cambrige University Press.
- , 1992.Institution and Common Pool Resources: Journal of Theoretical Politics. 4(3) – 243-245. Sage Publikation.
- Ostrom E, Schoeder L,Wynne S. 1993. Institutional Incentives and Sustanaible Development. Colorado: Westview Press.
- Ostrom E, Gardner R and Walker J, 1994. Rules, Games, And Common- Pool Resources. The University of Michigan Press. USA.
- Ostrom,E.1999. Self-Governace And Resources. Jakarta.Cifor Paper.No.20. Center for International Forestry Research. Bogor. Indonesia.
- , 2000. Private and Common Property Right ([http://encydo findlow.com/2000book.Pdf](http://encydo.findlow.com/2000book.Pdf)).
- , 2003. How Types of Good and Property Rights Jointly Affect Collective Action . Journal of Theorothical Polities, 15 (3); 239-270. London. Thousand Oaks. CA. and New Delhi.
- , 2005. Doing Institutions Analysis : Digging Deeperthan Market and Hierarchies. Handbook of new Institution Economic Netherland: Springer pp.819-848.
- , 2008. Doing Institutional Analysis: Digging Deeper Than Markets and Hierarchies. Didalam : Menard C, Shirley MM, Editor.

Handbook of new Institutional Economics. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

- Osmani, S. R. 2000. Participatory Governance, People's Empowerment and Poverty Reduction. SEPED Conference Paper Series No. 7. UNDP. Washington, D.C.
- Pakpahan. A. 1989. Kerangka Analitik Untuk Penelitian Rekayasa Sosial : Perspektif Ekonomi Intitusi. Proseding Patanas Evolusi Kelembagaan Pedesaan di Tengah Perkembangan Teknologi Pertanian. Puslit Agro Ekonomi. Badan Litbang Pertanian. Deptan . Jakarta.
- Paramita. B. 1985. Struktur Organisasi di Indonesia. Terjemahan Pandam Guritno. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Polski Margaret.M and Ostrom Elinor. 1999. An Institutional Framework for Policy Analysis and Design. Workshop in Political Theory an Policy Analysis Departement Of Political Science Indiana University.
- Priyadi Unggul. Peranan Inovasi Kelembagaan Pabrik Gula Madukismo Terhadap Pelaksanaan Usahatani Tebu di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. FE Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : Unggul@fe,uui.ac.id.
- Pruitt Dean G. dan Rubin Jeffrey Z. Sosial Konflik Escalation,Stalemate, and Settlement ; Alih Bahasa Helly P. Soetjipto dan Sri Mulayani Soetjipto (Teori Konflik Sosial). Pustaka Pelajar. Yohyakarta.
- Purwanto, Bambang, 2006. Gagalnya Historigrafi Indonesia , Ombak, Yogyakarta.
- Putnam , Robert, 2000. Bowling Alone: The Collapse and Revival of Amirican Community. New York Simaon and Schuster.
- Rahardjo, M.D, 1990. Tranformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja,UI-Press. Jakarta.
- Raharjo, Adisasmita, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yokyakarta: Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rudd, Muary A. 2003. An Institutional Framework for Designing and Monitoring Ecosystem – Based Fisheries Management Policy Experiment. Ecological Economic 48 (2004) 109 -124.

- Rustiani, Farida, dkk, 1997. Mengenal Usaha Pertanian Kontrak (Contract Farming). Akatiga. Bandung.
- , 2006. Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering : Jurnal Agro Ekonomi Vol 24 No.2 Oktober 2006: 178 -2006.
- Ruttan dan Hayami. 1984. Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Sadikin, Ikin, et.al. Kajian Kelembagaan Agribisnis Dalam Mendukung Pengembangan Sistem Usaha Pertanian Bebas Agroekosistem. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Balitbang Pertanian. Bogor.
- Sadikin dan Irawan Rudi. Dampak Pembangunan Perkebunan Karet Rakyat Terhadap Kehidupan Petani Di Riau. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. FPS IPB. Bogor.
- Saptana dan Ashari. 2007. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Kemitraan Usaha. Jurnal Litbang Pertanian, 26(24). Bogor. Hal 123-130.
- Saptana, dkk. 2003. Transformasi Kelembagaan Guna Memperkuat Ekonomi Rakyat di Pedesaan : Suatu Kajian Atas Kasus Di Kabupaten Tabanan Bali. Pusat Penelitian dan Pembangunan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- , 2004. Transformasi Kelembagaan Guna Memperkuat Ekonomi Rakyat di Pedesaan. Journal on Socio-Economics of Agricultural and Agribusiness. Bali.
- , 2005. Pengembangan Model Kelembagaan Mitra Usaha Hortikultura Yang Bedaya Saing. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- , 2006. Mewujudkan Keunggulan Komparatif menjadi keunggulan Kompetitif Melalui Pengembangan Kemitraan Usaha Holtikultura. Forum Penelitian Agro Ekonomi Bogor Vol.24.1, Juli 2006 : 61 -76.
- , 2008, Strategi Kemitraan Usaha Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Agribisnis Cabai Merah di Jawa Tengah. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian deptan. Bogor.

- Schneider, H. 1999. Participatory Governance: The Missing Link for Poverty Reduction. OECD Development Center, Policy Brief No. 17. Paris.
- Scott, James,C, 1976. The Moral Economy of The Peasant : Rebellion and Subsistence in Southeast Asia. Alih Bahasa. Hasan Basri. 1981 (Moral Ekonomi Petani). LP3ES. Jakarta
- Sediono Tjondronegoro, 1984. Gejala Organisasi dan Pengembangan Berencana Dalam Masalah-masalah Pembangunan. Bunga Rampai Anthropologi Terapan. LP3ES. Jakarta.
- 2006. Membangun Kelembagaan Berwawasan Kearifan Lokal. Seminar YAPADI, 24 Mei 2006.
- Selo Sumardjandan K Breazeale. 1993. Cultural Change in Rural Indonesia, Sebelas Maret University Press in Cooperation With Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- Setiyanto Agus. 2001. Elite Pribumi Bengkulu: Persepektif Sejarah Abad ke 19. Balai Pustaka .Jakarta.
- Setiowati Retno.2007. Kelembagaan Kebijakan Di Indonesia.Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.1 Nomor 2. Jakarta. Hal 61-72.
- Shah, P. and M.K. Shah., 1994. “Multifunction Irrigation Organisations: Advantage or Handicap”. *Irrigation Managemnt Network, Network Paper No.28, April 1994*.Londdon: Overseas Development Institute.
- Shuller, R.S, 2001, HR Issues In International Joint Ventures, International Journal of Human Resouces Management, 12, 1 – 50.
- Sidik, Haji, Abdullah, 1996. Sejarah Bengkulu 1500 -1990. Balai Pustaka. Jakarta..
- Singh.S, 2005, Contract Farming for Agricultural Development: Review of Theory and Practice With Special Reference to India,New Delhi,India : New Concept Information Systems Pvt.Ltd.
- Siregar Chairil N. 2007. Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia. Jurnal Sositeknolohi Edisi 12. Hal. 285-288.
- Smajgl, Alex, Anne Leitch and Tim Lynam, 2009. Institution Dynamies and Natural Resource Management. Adapting Rules for Sustainable resource Use Sustainable. CSIRO Ecosystem. Townville.

- , Anne Leitch. Dan Tim Lynam. 2009. Outback Institutions: An Application of the Institutional Analysis and Development (IAD) Framework to Four Case Studies in Australia's Outback. Desert Knowledge CRC.
- Soedjero, J. Kartini .2001. Konflik Pemanfaatan Tanah Eks Bengkulu di Kota Semarang. Laporan Penelitian. Fakultas Hukum Univ. Semarang. Semarang.
- Soedjito, 1994. Analisis Yuridis konvensi Tanah Bengkulu Menjadi Hak Pakai, Mimbar Hukum, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekartawi (1995). Pembangunan Pertanian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno, L. dan R. Winahyu, 1991. Kelapa Sawit. Kajian Sosial Ekonomi. Aditya Media. Yogyakarta.
- Soetriono, A Suwandari dan Rijanto. 2006. Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris, Agrobisnis dan Industri. Malang: Bayumedia.
- Sri Nuryanti, 2005, Pemberdayaan Petani Dengan Model Cooperative Farming, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Bogor (Vol.3). No.2, juni 2005 :152-169.
- Strauss Anselm and Juliet Corbin, 2003. Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi data alih Bahasa Muhammad Shodiq dan Iman Muttaqien. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soetriono, A Suwandari dan Rijanto. 2006. Pengantar Ilmu Pertanian: Agraris, Agrobisnis dan Industri. Malang: Bayumedia.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D., Alfabeta. Bandung.
- Suharto Edi. 2008. corporate Social Responsibility: what is and Benefit for Corporate. :www.policy.hu/suharto.
- Suharto, Edy, 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Startegis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial. Refika Aditama. Bandung.

- Suharyono, et.al. Analisis dan Rekayasa Kelembagaan Penunjang Teknologi Usahatani Padi dan Karet di Desa Sungai Jering Kabupaten Merangin Jambi. BPTP. Jambi.
- Sulistiyani Amabar Teguh. 2004. Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media. Yogyakarta.
- Sumardjo. Dkk. 2004. Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Supriyatna Yana, et.al. 2006. Analisis Kelembagaan Kemitraan Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging : Studi Kasus Di Propinsi Bali : Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Suradisastra, Kedi. 1999. Peranan Pemerintah Dalam Pemacuan Industrilisasi Pertanian. Dalam Dinamika Inovasi Ekonomi dan Kelembagaan Pertanian. PSE Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.
-, 2008. Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Petani. Forum Penelitian. Agro Ekonomi Vol.26 No. 2. Bogor. Hal 82-91.
- Suradisastra. Kedi. dkk. 2002. Institutional Description of Balinese Subak. Jurnal Litbang Pertanian. 21:1pp 11- 19.
- Sutawi. 2008. Pembiayaan Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sektor Agribisnis dengan Pola Kemitraan : Jurnal Keuangan dan Perbankan ,Vol.12.No.3. hal. 447-458. Malang.
- Sunarko 2009. Budidaya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan.PT. Agro Media Pustaka. Jakarta.
- Suntoro, Eko, 2008. Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa. IRE. Yogyakarta.
- Suntoro, Eko,.Ekonomi Politik Pembaharuan Desa: <http://www.ire.yogya.org/suntoro/Ekonomi-politik-pembaharuan-desa.pdf>.
- Sutrisno, Edy, 2010. Budaya Organisasi. Prenada Media Group. Jakarta.
- Suyono.2006. Pengaruh Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) Terhadap Pendapatan Petani Budidaya Ulut Sutra di Kabupaten Wonosobo.PPS.Undip. Semarang..

- Syahmunir. 2004. Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Pereundang-Undangan Di Indonesia. Pusat Pengkajian Islam dan Minang Kabau. Padang
- Syahza Almasdi. 2001. Peluang Pengembangan Pabrik Kelapa Sawit Skala Kecil Di Daerah Riau. Sosial, Vol.1 No 2 Lembaga Penelitian Universitas Merdeka Madiun.
- 2005. Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Multiplier Effect Ekonomi Pedesaan di Daerah Riau. Jurnal Ekonomi Th.X/03/Nov/2005 PPDI: Fakultas Ekonomi Univ.Tarumanegara . Jakarta.
- 2012. Model Pengembangan Kelembagaan Perkebunan Dalam Mendukung Keberdayaan Ekonomi Masyarakat. Simposium dan Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing dan Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Perkebunan. Pekan Baru.
- Syahni, Abdul, 2009. Potensi Tradisi Lokal Dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan :[http:// Blog.unila.ac.id /abdulsyahni/ files/2009/10/ potensi+tradisi+local](http://Blog.unila.ac.id/abdulsyahni/files/2009/10/potensi+tradisi+local).
- Syahyuti. 2003. Bedah Konsep Kelembagaan : Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Bogor.
- 2004a. Pemerintah, Pasar, dan Komunitas Faktor Utama Dalam Pengembangan Agribisnis Di Pedesaan. Forum Penelitian Agro Ekonomi Bogor Vol. 22 No. 1, Juli 2005: 54-62
- , 2004b. Model Kelembagaan Penunjang Pengembangan Pertanian Di Lahan Lebak. Disampaikan dalam Workshop Nasional Pengembangan Lahan Rawa Lebak, Balittra . Bajar Baru. Kalimantan Selatan.
- , 2007, Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di Perdesaan. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1, Maret 2007.
- 2008. Peran Modal Sosial (Social Capital) Dalam Perdagangan Hasil Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 26 No.1, Juli 2008: 32 – 43.
- Syahrani Husainie. 2003. Analisis Kelayakan Finansial pengusaha Hutan dengan Tanaman Buah Durian (*Durio Zibethis Murr*) di Kabupaten

Kutai Kertanegara Propinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 8 No. 2 : 137 – 148.

Tanudjaja Bing Bedjo.2006. Perkembangan Corporate Social Responsibility Di Indonesia.: <http://www.petra.ac.id/puslit/journals/dir.php?DepartemenID=DKV>

Todaro, M.P. 1983. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga . Alih bahasa Aminuddin dan Mursid. Ghalia. Jakarta.

Tjondronegoro, SM. P. 1984. Gejala Organisasi dan Pengembangan Berencana Dalam Masalah – Masalah Pembangunan. Bunga Rampai Anthropolgi Terapan. LP3ES. Jakarta.

Triantoro,Safira. 2004. Kepemimpinan. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Tri Pranadi dan B. Sudaryanto. 1998. Kajian Terhadap Persepsi Petani dan Kelembagaan Korporasi Untuk Pengembangan Usaha Ternak Domba Di Pedesaan : Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Pusat Penelitian Ekonomi. Bogor.

Tri Pranadji. 2003. Reformasi Kelembagaan dan Kemandirian Perekonomian Pedesaan (kajian pada kasus Agribisnis Padi Sawah). Makalah disampaikan pada Seminar Nasional” Peluang Indonesia untuk Mencukupi Sendiri Kebutuhan Beras Nasionalnya”, Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.

Tri Chandra Aprianto. 2009. Manakala Konflik Berkepanjangan Harus Diselesaikan: Kasus Konflik Perkebunan Ketejek, Jember. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 13 Nomor 1 Juli 2009 (71 – 90). Yogyakarta.

Uphoff Norman, 1986. Local Institution Development ; An Analytical sourcebook. West Hartford. Kumarian Press. Washington DC. USA.

----- . 1992. Local Institution and Participation for sustanaible Development. (Gate-keeper Series, No.31).

Valerina, Darwis dkk.,. 2006. Revitalisasi Kelembagaan Kemitraan Usaha Dalam Pembangunan Agribisnis Holtikultura di Propinsi Sumatra Utara. Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24 No 2. Bogor hal 123-134.

Wade Robert.1987. The management Of Common Property Resources: Collective Action as An Alternative to Privatisation or State Regulation. Cambridge Journal of Economics, 11:95-106.

- Wahyuni, Ira, Syarfi. 2007. Pembangunan Perkebunan Rakyat di Sumatra Barat (Suatu Kajian Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Kerayatan): Desertasi Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.
- Weissberg, R. 1999. The Politics of Empowerment. Praeger. Westport, Connecticut and London.
- Widodo, Slamet. 2008. Perubahan Kebudayaan, Teknologi, Ideologi dan Nilai. <http://learning-of.slametwidodo.com/2008/02/01/perubahan-kebudayaan-teknologi-ideologi-dan-nilai/>
- Wigena, I Gusti Putu, et.al. 2009. Desain Model Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Plasma Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Sistem Dinamis (Studi Kasus Kebun Kelapa Sawit Plasma PTP Nusantara V Sei Pagar Kabupaten Kampar Riau. *Jurnal Agro Ekonomi* Vol 27 No.1 Bogor. Hal 81-108.
- Wilkinson, K. P. 1972. A Field-Theory Perspective for Community Development Research. *Rural Sociology*, Vol. 37/1, pp. 43-51.
- Wijaya, HAW. 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Woolcoek, D. Narayan. 2000. Social Capital : Implication For Development Theory, Research, and Policy. *World Bank Research Observer*, 15 (2), Augt, 225-491. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Foundation of Capital*. Massachusetts : Edward Elgar Publishing Limited.
- Yondri. et.al. 2001. Budaya Masyarakat Suku Bangsa Mukomuko dan Lingkungannya di Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu. *Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sumatra Barat*. PD. Syukri. Padang.
- Yustika. 2006. *Ekonomi Kelembagaan Definisi, teori dan Strategi*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Zakaria, Wan Abbas. 2009. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kuinci Kesejahteraan Petani. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/files/MP_Proc_C3_2009.pdf
- Zamhariri. 2008. Pengembangan Masyarakat: Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan. *Komunitas*, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Volume 4, Nomor 1, Juni 2008: 101-110.

Lampiran 1. Daftar pertanyaan Community (Masyarakat)

Quesioner

Nama Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Mukomuko
Propinsi : BENGKULU

Nama Responden :

Kejelasan Batasan definisi kebun Kas Desa

1. Apakah Bapak/ibu mengetahui di desa ini, tentang keberadaan kebun kas desa.
 - a. ya
 - b. tidak
2. Jika Bapak/ibu mengetahui, dari mana Bapak/ibu mengetahuinya
 - a. Cerita orang
 - b. Dekat kebun sendiri
 - c. Perangkat desa/pengurus
3. Apakah Bapak menjadi anggota kebun kas masyarakat desa
 - a. Ya
 - b. Tidak tahu
 - c. Jelaskan
4. Menurut Bapak/ibu apa yang harus dipenuhi persyaratan menjadi anggota
 - a. Seluruh warga
 - b. Rumah tangga
 - c. Anaka cucu kaum
 - d. Tidak jelas
5. Apa yang menjadi batasan kebun kas masyarakat desa
 - a. Drenase
 - b. Jalan
 - c. Tonggak
 - d. Tidak jelas
6. Bagaimana menurut Bapak status kepemilikan lahan KMD
 - a. Sertifikat
 - b. Surat desa
 - c. SKT
 - d. Tidak jelas

Kesesuaian aturan yang digunakan

7. Apakah Bapak mengetahui peraturan yang digunakan KMD
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Jelaskan
8. Apakah KMD menggunakan aturan dibawah ini
 - a. Perdes
 - b. Hasil rapat desa
 - c. Aturan adat
 - d. Tidak jelas
9. Menurut pandangan Bapak bagaimana kedudukan aturan adat pada pada KMD
 - a. Dipakai sebagai pedoman
 - b. Tidak jelas
10. Apa landasan norma yang digunakan dalam KMD
 - a. Agama
 - b. Kearifan lokal
 - c. Tidak jelas
11. Bagaimana kedudukan seseorang dihargai menurut pandangan Bapak, apakah karena;
 - a. Status
 - b. Dihargai karena prestasi
 - c. Hubungan emosional
12. Bagaimana menurut pandangan Bapak/ibu terhadap sistem reward dan punishment
 - a. Tidak tegas tidak jalan
 - b. Tidak tegas namun jalan
 - c. Tidak tegas tidak jalan
 - d. Tegas dan jalan
13. Bagaimana pemahaman anggota tentang; tentang prosedur, norma, dan aturan-aturan pada KMD
 - a. Sedikit
 - b. Banyak
 - c. Tidak jelas
14. Bagaimana kedisiplinan dijalankan dalam KMD
 - a. Tidak disiplin
 - b. Disiplin tapi tidak jalan
 - c. Disiplin dan jalan

Aksi Kolektif dan Solideritas

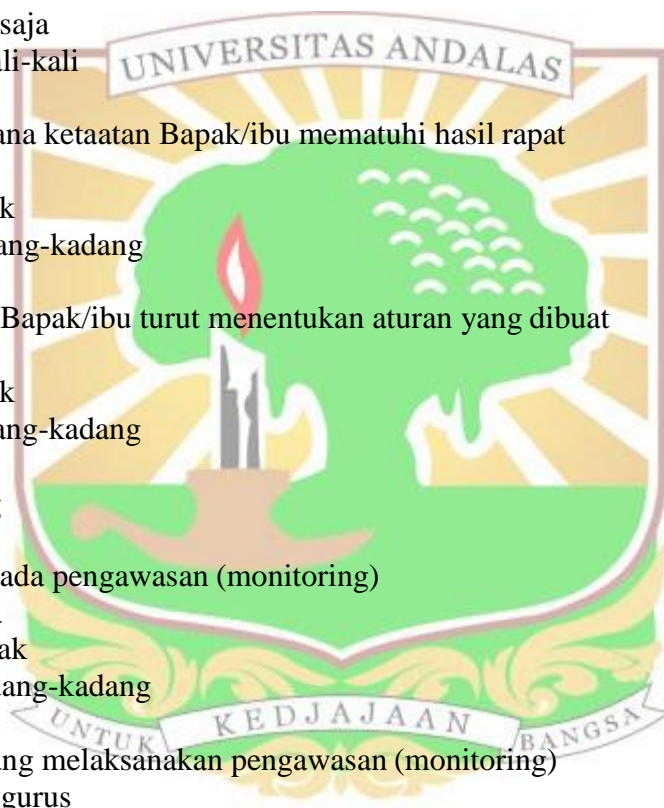
15. Jika rapat di desa bagaimana kehadiran warganya
 - a. Baik
 - b. Tidak
 - c. Biasa-biasa saja
16. Bagaimana kehadiran Bapak/ibu dalam rapat-rapat desa atau KMD
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Sekali-sekali
17. Bagaimana keaktifan Bapak/ibu dalam rapat desa/KMD
 - a. Ya
 - b. Ikut saja
 - c. Sekali-kali
18. Bagaimana ketaatan Bapak/ibu mematuhi hasil rapat
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
19. Apakah Bapak/ibu turut menentukan aturan yang dibuat
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang

Monitoring

20. Apakah ada pengawasan (monitoring)
 - a. Ada
 - b. Tidak
 - c. Kadang-kadang
21. Siapa yang melaksanakan pengawasan (monitoring)
 - a. Pengurus
 - b. LSM
 - c. Lainnya/tidak jelas
22. Apa saja yang diawasinya yang Bapak/ibu ketahui
 - a. Pekerjaan fisik kebun
 - b. Keuangan
 - c. Lainnya/tidak jelas

Sanksi Berjenjang

23. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan dalam KMD



- a. Ada
- b. Tidak ada
- c. Jika ada sebutkan

24. Siapa yang melakukan pelanggaran

- a. Masyarakat
- b. Pengurus
- c. Perangkat desa
- d. Perusahaan mitra
- e. Pihak lain

25. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar

- a. Sesuai dengan tingkat kesalahan
- b. Sesuai dengan aturan bersama
- c. Sesuka pengelola/desa

26. Apa bentuk sanksi yang diberikan

Mekanisme penyelesaian konflik

27. Apakah pernah terjadi perselisihan/konflik pada KMD

- a. Pernah
- b. Tidak pernah
- c. Kadang-kadang
- d. Jika ya sebutkan bentuk konflik tersebut

28. Pihak mana yang melakukan konflik

- a. Perusahaan dengan pengelola/desa
- b. Perusahaan dengan masyarakat
- c. Pengelola dengan masyarakat
- d. Sebutkan

29. Bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi sebutkan

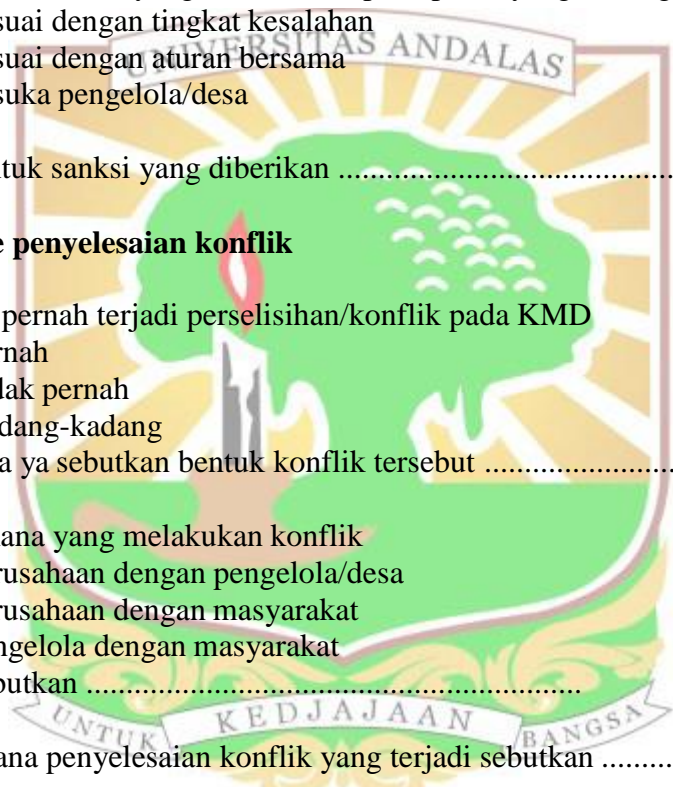
30. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam penyelesaian konflik sebutkan

Pengakuan hak berorganisasi

31. Aturan apa yang dipakai pada KMD, sebutkan

32. Adakah aturan yang digunakan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, sebutkan

Cabang Usaha



33. Adakah cabang usaha lain KMD, selain kebun kas masyarakat desa ini.
- a. ada
 - b. tidak ada
 - c. Jika ada sebutkan
34. Pihak mana yang mengelolanya usaha tersebut, sebutkan.....
35. Bagaimana hubungannya dengan KMD, sebutkan



Lampiran 2. Panduan Wawancara (Pengelola Kebun Kas Masyarakat Desa)

Key Informan

Nama Kelembagaan:

Nama Desa :.....

Kecamatan :

Kabupaten : Mukomuko

Propinsi : BENGKULU

Nama responden/nara Sumber dan kedudukan dalam kelembagaan:

Karakteristik umum kelembagaan

1. Jenis kelembagaan berupa; Koperasi, Panitia desa, Karang Teruna, Seandek, Kelompok kerja, Lainnya, sebutkan.....
2. Tahun berdiri kelembagaan : tahun.....
3. Sejarah kelembagaan. Uraikan secara ringkas berbagai perkembangan penting kelembagaan semenjak berdiri samapai sekarang :

Tahun	Peristiwa
	Kesepakatan awal
	Pengelola dibentuk
	Mulai mengerjakan
	Mulai ditanam

4. Kelembagaan memiliki badan hukum pendirian/ Jawab : Ya atau tidak. Jika sudah, sebutkan dasar badan hukum tersebut:

Aspek Keorganisasian (Struktural)

A. Struktur kelembagaan

1. Luas cakupan wilayah kelembagaan? : Sempit, terbatas geografis, Luas, borderless
2. Jumlah anggota,
3. Tingkat kekomplekan strukturnya?
4. Struktur kekuasaan yang terbangun? Siapa pihak yang berperan mengambil keputusan secara dominan : Pemimpin, secara tunggal, Dewan pimpinan, rapat anggota (seperti RAT dikoperasi)
5. Pola sebaran kekuasaan; Berbentuk sentralistik, Berbentuk distributive
6. Sifat fleksibilitas struktur yang ada, ketika menghadapi tekanan internal dan eksternal?
7. “Klik” dalam kelembagaan?

Tujuan kelembagaan

1. Tujuan – tujuan yang dimiliki, baik secara eksplisit maupun implicit?
 1. Kesamaan tujuan antar seluruh anggotanya dengan kelembagaan?
 2. Banyak dan ragam tujuan-tujuannya? Jika jumlah tujuannya sedikit menandakan bentuk asosiasi, namun jika banyak dekat dengan bentuk group primer (primary group).

Keanggotaan

1. Pola perekrutan anggota, Sukarela dan bebas keluar masuk, Tidak sukarela, terbatas dan tertutup
2. Pihak yang memutuskan perekrutan anggota, Diputuskan dari luar, Dari dalam sendiri
3. Rasa kesetiaan dan pengabdian anggota kepada kelompok ; Rendah, Tinggi
4. Frekwensi pertemuan, Semakin jarang. Tetap, Semakin sering
5. Keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, Rendah dan terbatas, Tinggi danmelibatkan banyak anggota

Kepemimpinan

1. Kepemimpinan dipilih dan ditetapkan, Atas dasar azas paternalistic, Kesenioran, Kemampuan atau keprofesionalan

2. Kekuasaan yang dimiliki pemimpin?, Berupa reward power untuk member penghargaan, Coercive power untuk member sanksi, Legitimate power yang berdasarkan hukum, Exert power karena kemampuannya
3. Kepemimpinan yang diterapkan, Autokratis, Laissez faire, Demokratis
4. Kepemimpinan berganti secara regular?
5. Suasana inklusifitas dalam kelembagaan? Bagaimana keterlibatan pemuda, wanita, golongan minoritas, kelompok miskin, dan lain-lain?
6. Kualitas kepemimpinan? Dalam hal pendidikan yang dimiliki, visi, profesionalitas, keterbukaan, dan lain-lain.

(2) Aspek Kelembagaan Kultural

A. Sistem tata nilai (berdasarkan katagori Kluckhohn)

1. Tatanilai yang dianut oleh anggota kelembagaan yang kita kaji? Bagaimana hakekat hidup yang dianut mereka; Hidup merupakan suatu yang baik, Hidup merupakan sesuatu yang buruk
2. Nilai- nilai apa yang diterapkan dalam bekerja; Bekerja untuk mencukupi nafkah hidup, Bekerja untuk kehormatan diri dan keluarga, Bekerja sebagai karya
3. Persepsi secara umum terhadap waktu, Berorientasi ke masa depan, Berorientasi ke masa lalu, Berorientasi ke masa sekarang
4. Berkenan dengan hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana sikap dasar tentang hubungan manusia dengan sesame yang berkembang; Berorientasi horizontal, Berorientasi vertical, Individualis, Komunitas
5. Persepsi kedudukan manusia terhadap alam biofisik; Menunjung tinggi keselarasan, Tunduk terhadap alam, Menguasai alam

Norma

1. Landasan norma yang digunakan; bersumber dari agama, dari kearifan setempat, dari keyakinan lain

2. Persepsi terhadap kedudukan seseorang; Orang lebih dihargai karena status, Orang lebih dihargai karena prestasi dan kemampuan
3. Persepsi anggota secara umum terhadap system reward dan punishment, Tidak tegas, tidak berjalan, Tidak tegas namun berjalan, Tegas, namun tidak jalan, Tegas, dan jalan

Kultur kelembagaan

1. Banyak anggota tahu tentang prosedur, norma dan uraian –uraian aturan dalam kelembagaan ; Sedikit, Banyak, Semua
2. Kedisiplinan dijalankan ; Tidak ada disiplin, Ada disiplin, tapi tak dijalankan, Ada disiplin dan dijalankan
3. Iklim utama dalam kelembagaan; berlandaskan otoriter, Demokratis
4. Factor utama yang membentuk system kerja; Karena factor kebiasaan, Berdasarkan efisiensi manajemen

Kapasitas Kelembagaan

Kemampuan kelembagaan untuk melakukan peran-peran berikut: Mengelola kredit dan simpan pinjam, Mendampingi atau membina kelompok lain, Menghadapi perubahan-perubahan lingkungan, berupa –perubahan harga, iklim pemerintahan dan lain-lain, Mengambil pelajaran dari sejarahnya sendiri, Menangani konflik baik internal maupun eksternal, Membangun jaringan deng pihak luar

Lampiran 3. Panduan Wawancara Pemuka Masyarakat

Key Informan

Nama Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Mukomuko
Propinsi : BENGKULU

Nama Narasumber :

Batasan hak dan anggota yang jelas (Clearly defined boundaries)

Social boundaries

1. Pihak yang bisa menjadi anggota kebun masyarakat desa (KMD); Apakah selain masyarakat desa ini bisakah orang diluar desa menjadi anggota , Apa yang menjadi batasan untuk menjadi anggota KMD

Physical boundaries

2. Gambaran batasan kebun masyarakat desa (batasan kebun, laus kebun, jumlah batang kelapa sawit)
3. Sarana prasarana yang dimiliki KMD
4. Gambaran batas-batas desa anda ? (sebutkan batas-batas geografis, nama-nama tempat, dan sebutkan "komunitas" apa saja yang terdapat dalam desa dan lokasinya)
5. Letak posisi-masing-masing objek berikut? (sawah, lading, hutan, sekolah, puskesmas, posyandu, sumber mata air, sumber listrik, jalan-jalan utama, pasar, toko, tempat ibadah, area rekreasi, jaringan irigasi, dan lain-lain).
6. Lama masyarakat desa ini terbentuk ? Siapa saja yang datang dan pergi dari desa ini ? Bagaimana Perkembangan "Hubungan- hubungan Ketetanggaan " (Neighborhood) selama 5 tahun terakhir ? semakain lemah, tetap, atau berkembang ?

Rules regarding the appropriation and provision of common resources are adapted to local condition

7. Aturan apa yang digunakan dalam digunakan pada KMD
8. Kedudukan aturan adat
9. Landasan norma yang digunakan (bersumber dari agama, kearifan local, dari keyakinan)
10. Persepsi terhadap kedudukan seseorang (orang dihargai karena status, orang dihargai karena prestasi dan kemampuan)
11. Persepsi anggota secara umum terhadap system reward dan punishment (tidak tegas tidak jalan, tidak tegas namun jalan, tegas namun tidak jalan, tegas dan jalan)
12. Banyak anggota tahu tentang prosedur, norma dan uraian –uraian aturan dalam kelembagaan (sedikit, banyak, semuanya)
13. Kedisiplinan dijalankan (tidak ada disiplin, ada disiplin tapi tidak jalan, ada disiplin dan dijalankan)
12. Collective choice arrangement allow most resources appropriators to participate in the making process.
13. Rapat di desa bagaimana kehadiran warganya, Baik, Tidak, Biasa-biasa saja
14. Kehadiran Bapak/ibu dalam rapat-rapat desa atau KMD
15. Keaktifan Bapak/ibu dalam rapat desa/KMD
16. Ketaatan Bapak/ibu mematuhi hasil rapat
17. Pihak yang menentukan aturan yang dibuat

Effecitve monitoring by monitor who are part or accountable to the appropriators

18. Pengawasan (monitoring)
19. Pihak yang melaksanakan pengawasan (monitoring); Pengurus, LSM, Lainnya/tidak jelas
20. Apa saja yang diawasinya yang Bapak/ibu ketahui; Pekerjaan fisik kebun, Keuangan, Lainnya/tidak jelas
21. Mechanisme of conflict resolution are cheap and of easy access

22. The self-determination of the community is recognized by higher-level authorities

Aksi kolektif dan Solideritas

22. Tentang gotong royong ? (pendidikan, kesehatan pelayanan umum, jalan dan transportasi, pasar, kredit, keamanan, kesehatan, untuk anak, irigasi pertanian)

23. Akses yang sama terhadap hal-hal berikut: (pendidikan, kesehatan pelayanan umum, jalan dan transportasi, pasar, kredit, keamanan, kesehatan, untuk anak, irigasi pertanian).

24. Usaha komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup atau mengatasi masalah secara bersama ?.

25. Aksi kolektif, adakah kegagalan yang dihadapi ? Apa yang harus dilakukan agar berhasil ?

Struktur kekuasaan dalam komunitas dan pola pengambilan keputusan

26. Pemimpin utama dalam komunitas ? (baik formal maupun informal)

27. Pembuatan keputusan dalam komunitas ? Apa peranan pemimpin ? Bagaimana keterlibat anggota komunitas dalam pembuatan keputusan ?.

28. Pembuat keputusan dalam rapat-rapat/pertemuan.

Daftar kelembagaan yang terdapat dalam komunitas

29. Apa saja kelompok, organisasi, atau asosiasi yang ada dalam desa ? (baik yang berjalan maupun bukan).

30. Dari seluruh kelembagaan yang ada, kelembagaan apa yang dimainkan peranan aktif untuk membantu kesejahteraan warga desa/komunitas secara umum ?

31. Bagaimana masing-masing kelembagaan tersebut tumbuh ? Apakah merupakan inisiatif dari pemerintah, LSM, atau dari masyarakat sendiri ?.

32. Bagaimana kepemimpinan ditetapkan? (dipilih, ditetapkan secara musyawarah, atau karena turunan). Bagaimana kestabilan kepemimpinannya? (sering berubah, jarang, atau tak pernah berubah). Apakah secara umum ditubuh kepemimpinan harmonis atau banyak konflik?

33. Bagaimana pembuatan keputusan dalam kelembagaan tersebut?

Hubungan antara kelembagaan-kelembagaan yang ada dengan komunitas

34. Buat diagram venn seluruh kelembagaan. (besar lingkaran menunjukkan tingkat kepentingan)

35. Dari seluruh kelembagaan, mana yang paling penting, dan yang kurang penting?

36. Dari seluruh kelembagaan, mana yang paling diterima dan yang kurang diterima oleh komunitas?

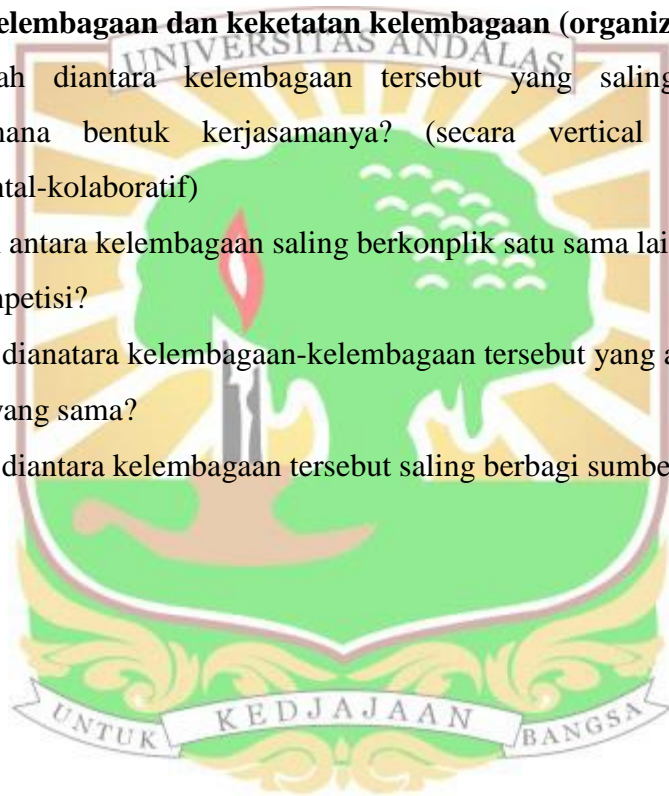
Jaringan kelembagaan dan keketatan kelembagaan (organizational density)

37. Manakah diantara kelembagaan tersebut yang saling bekerja sama? Bagaimana bentuk kerjasamanya? (secara vertical –hierarkhis atau horizontal-kolaboratif)

38. Adakah antara kelembagaan saling berkonplik satu sama lain, atau hanya berkompetisi?

39. Adakah diantara kelembagaan-kelembagaan tersebut yang anggotanya orang-orang yang sama?

40. Adakah diantara kelembagaan tersebut saling berbagi sumberdaya yang sama?



Lampiran 4. Panduan wawancara Perangkat Desa

Key Informan

Nama Kelembagaan;

Nama Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Mukomuko

Propinsi : BENGKULU

Nama :

Jabatan :

-
1. Batas-batas desa anda ? (sebutkan batas-batas geografis, nama-nama tempat, dan sebutkan "komunitas" apa saja yang terdapat dalam desa dan lokasinya)
 2. Batasan Kebun Kas masyarakat Desa
 3. Kelembagaan memiliki badan hukum pendirian/ Jawab
- Aspek Keorganisasian (Struktural)**

Struktur kelembagaan

4. Cakupan wilayah kelembagaan?
5. Jumlah Penduduk
6. Ratio penduduk laiki-perempuan
7. Tingkat Ekonomi Masyarakat
8. Usaha utama masyarakat
9. Jumlah anggota KMD
10. Struktur kekuasaan yang terbangun? Siapa pihak yang berperan mengambil keputusan secara dominan?

11. Pola sebaran kekuasaan pada KMD
12. Sifat fleksibilitas struktur yang ada, ketika menghadapi tekanan internal dan eksternal?
13. Adakah “klik” dalam kelembagaan?

Tujuan kelembagaan

3. Tujuan – tujuan yang dimiliki, baik secara eksplisit maupun implicit?
4. Adakah kesamaan tujuan antar seluruh anggotanya dengan kelembagaan?
5. Banyak dan ragam tujuan-tujuannya? Jika jumlah tujuannya sedikit menandakan bentuk asosiasi, namun jika banyak dekat dengan bentuk group primer (primary group).

Keanggotaan

6. Bagaimana Pola perekrutan anggota
7. Siapa yang memutuskan perekrutan anggota?
8. Rasa kesetiaan dan pengabdian anggota kepada kelompok ?
9. Frekwensi pertemuan pengurus KMD, Masyarakat.
10. Keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan?

Kepemimpinan

11. Kepemimpinan dipilih dan ditetapkan?
12. Kekuasaan yang dimiliki pemimpin?
13. Gaya kepemimpinan yang diterapkan?
14. Kepemimpinan berganti secara regular?
15. Suasana inklusifitas dalam kelembagaan? Bagaimana keterlibatan pemuda, wanita, golongan minoritas, kelompok miskin, dan lain-lain?
16. Bagaimana kualitas kepemimpinan? Dalam hal pendidikan yang dimiliki, visi, profesionalitas, keterbukaan, dan lain-lain.

Aspek Kelembagaan Kultural

Sistem tata nilai (berdasarkan katagori Kluckhon)

17. System tatanilai yang dianut oleh anggota kelembagaan yang kita kaji?
Bagaimana hakekat hidup yang dianut mereka?
18. Nilai- nilai apa yang diterapkan dalam bekerja?

19. Bagaimana persepsi secara umum terhadap waktu
20. Berkenan dengan hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana sikap dasar tentang hubungan manusia dengan sesama yang berkembang?
21. Bagaimana dengan persepsi kedudukan manusia terhadap alam biofisik?

Norma

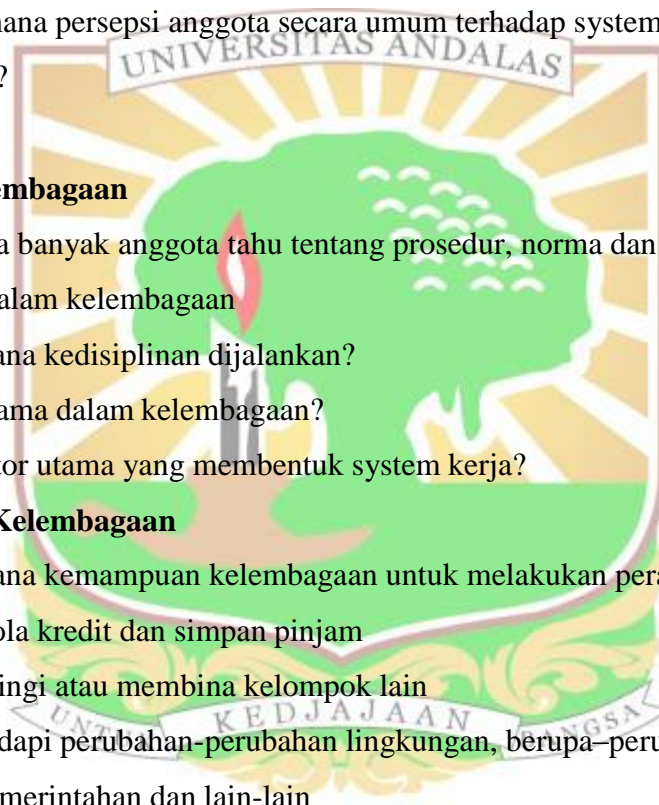
22. Apa landasan norma yang digunakan
23. Bagaimana persepsi terhadap kedudukan seseorang?
24. Bagaimana persepsi anggota secara umum terhadap system reward dan punishment?

Kultur kelembagaan

25. Seberapa banyak anggota tahu tentang prosedur, norma dan uraian –uraian aturan dalam kelembagaan
26. Bagaimana kedisiplinan dijalankan?
27. Iklim utama dalam kelembagaan?
28. Apa factor utama yang membentuk system kerja?

Kapasitas Kelembagaan

29. Bagaimana kemampuan kelembagaan untuk melakukan peran-peran berikut:
30. Mengelola kredit dan simpan pinjam
31. Mendampingi atau membina kelompok lain
32. Menghadapi perubahan-perubahan lingkungan, berupa –perubahan harga, iklim pemerintahan dan lain-lain
33. Mengambil pelajaran dari sejarahnya sendiri
34. Menangani konflik baik internal maupun eksternal
35. Membangun jaringan dengan pihak luar



Lampiran 5. Photo copy Perjanjian Kerjasama Panitia Desa Pasar Bantal dengan PT. Agromuko, tanggal 07 April 2001.

PERJANJIAN KERJASAMA
PANITIA DESA .. PASAR .. BANTAL .. DENGAN PT. AGRO MUKO
PASAR BANTAL

Perjanjian ini dibuat pada tanggal 07 April 2001.
PANITIA DESA .. PASAR .. BANTAL.
Yang dalam hal ini diwakili oleh .. SAMSUAR.
Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Dan

PT. AGRO MUKO ("Perseroan"), berkedudukan di Medan, Jalan Let. Jend. S Paman No. 217, yang dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk selanjutnya akan disebut PIHAK KEDUA

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit Pihak Pertama yang selanjutnya akan disebut Kebun Kas Desa seluas 15 ha dilokasi desa Pasar Bantal Kecamatan PD. SUGUH Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, dan mengingat Kesepakatan Bersama Pembentukan Panitia Desa tanggal 07 April 2001 Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sepakat untuk mengadakan perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kedua bersedia membantu pembiayaan dan pengelolaan Kebun Kas Desa pihak kedua seluas 15 ha yang terletak di Desa PS. BANTAL Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu untuk dijadikan kebun kelapa sawit sesuai standar kultur teknis yang baik dan benar.

Pasal 2

Semua biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua untuk keperluan Kebun Kas Desa Pihak Pertama diatas akan menjadi beban dan hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dimana untuk itu Pihak Kedua akan mengirimkan tagihan setiap bulannya kepada Pihak Pertama.

Hutang ini bersama bunga sebesar 5 % per tahun akan dipotong dari hasil penjualan tandan buah segar (TBS) Kebun Kas Desa.

Pasal 3

Jangka waktu pembiayaan ditetapkan selama ..15 Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini.

Pasal 4

- (1) Pihak Pertama Wajib menjual seluruh hasil tandan buah segar (TBS) Kebun Kas Desa kepada pihak kedua dan pihak kedua wajib membeli TBS tersebut.
- (2) Penetapan harga kebun Kas Desa Pihak Pertama akan ditentukan setiap bulan oleh Pihak Kedua sesuai dengan harga pasar yang berlaku disekitar kebun pihak kedua.
- (3) Hasil penjualan TBS pihak pertama kepada Pihak Kedua akan dipotong langsung

Pasal 5

Sebagai Jaminan bahwa Pihak Pertama akan menjual hasil tandan buah segar (TBS) Kebun Kas Desa kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan menyerahkan surat hak kepemilikan atas tanah Kebun Kas Desa berikut tanamannya yang ada di atasnya yang dikeluarkan oleh Camat

Pasal 6

Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ~~07-04-2001~~ 07 April 2016 sampai dengan dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan tertulis oleh Kedua Belah Pihak.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur berdasarkan musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.
- (2) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur.

Demikian perjanjian ini dibuat atas dasar kesepakatan bersama dan dibuat dengan 2 rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu berada pada Pihak Pertama yang lainnya berada pada Pihak Kedua, dengan disaksikan oleh saksi-saksi.

Desa Pasar Bantal 07 April 2001.



Pihak Pertama

[Signature]
(SAMSUAR)

Pihak Kedua
PT. AGRI
General Manager Office

[Signature]
Senior Manager Administration

Saksi :

Jabatan.

Tanda Tangan.

- 1. AMIRUDIN...
- 2. MAHYUDIN...
- 3. ARDULHAQ...

- 1. KEPALA DESA
- 2. KETUA I IKMD
- 3. LMD

- 1. *[Signature]*
- 2. *[Signature]*
- 3. *[Signature]*

Lampiran 6. Photo Copy Perjanjian Kerjasama Panitia Desa Ujung Padang dengan PT. Agromuko, tanggal 01 Nopember 2000.

FAX TO CA
ATTN: IBU KEPTI

1/3

PERJANJIAN KERJASAMA
PANITIA DESA UJUNG PADANG DENGAN PT. AGRO MUKO

Perjanjian ini dibuat pada tanggal 01 Nopember 2000 oleh dan antara :

PANITIA DESA Ujung Padang
Yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris
Untuk selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA.

dan

PT. AGRO MUKO ("Perseroan"), berkedudukan di Medan, jalan Let. Jend. S. Parman No. 217,
yang dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur Perseroan
untuk selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit Pihak Pertama
yang selanjutnya akan disebut Kebun Kas Desa seluas 15 Ha (Lima belas Hektar) dilokasi Desa
Ujung Padang, Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu,
dan mengingat Kespakatan Bersama Pembentukan Panitia Desa tanggal 25 Agustus 2000
maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sepakat untuk mengadakan perjanjian sebagai berikut

Pasal 1

Pihak Kedua bersedia membantu pembiayaan dan pengelolaan Kebun Kas Desa Pihak Pertama
seluas 15 Ha (Lima belas Hektar) yang terletak di Desa Ujung Padang, Kecamatan Mukomuko
Utara, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu untuk dijadikan kebun kelapa sawit sesuai
standar kultur teknis yang baik dan benar.

Pasal 2

1. Semua biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua untuk keperluan Kebun Kas Desa Pihak
Pertama diatas akan menjadi beban dan hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dimana
untuk itu Pihak Kedua akan mengirimkan tagihan setiap bulannya kepada Pihak Pertama.
Hutang ini bersama bunga 5 % (Lima persen) per tahun akan dipotong dari hasil penjualan
tandan buah segar (TBS) Kebun Kas Desa.
2. Perhitungan bunga dilakukan sejak saat Pihak Kedua menyetor dana kepada Pihak Pertama.

Halaman 1 dari 3

Pasal 3

1. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak bulan penanaman kelapa sawit.
2. Pihak Pertama akan melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Pihak Kedua yaitu dimulai pada bulan ke 49 (empat puluh sembilan) setelah penanaman kelapa sawit.

Pasal 4

1. Pihak Pertama wajib menjual seluruh hasil tandan buah sega (TBS) Kebun Kas Desa kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib membeli TBS tersebut.
2. Penetapan harga hasil Kebun kas Desa Pihak Pertama akan ditentukan setiap bulan oleh Pihak Kedua sesuai dengan harga pasar.
3. Hasil penjualan TBS Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dipotong langsung oleh Pihak Kedua setiap bulannya sebesar 15 % (Lima belas persen) dari total penjualan sebagai angsuran hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Pasal 5

Sebagai jaminan bahwa Pihak Pertama akan menjual hasil TBS Kebun Kas Desa kepada Pihak Kedua maka Pihak Pertama akan menyerahkan surat hak kepemilikan atas tanah Kebun Kas Desa berikut tanaman yang ada di atasnya yang dikeluarkan oleh Camat Mukomuko Utara.

Pasal 6

Perjanjian ini berlaku mulai sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berakhir sampai dengan lunasnya hutang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua atau selambat-lambatnya tahun 2013 (Dua ribu tiga belas)

Pasal 7

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur berdasarkan musyawarah mutakat oleh kedua belah pihak.

- 2. Mengonfirmasi perjanjian ini dan segala akibatnya kepada kedua pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu.

Demikian Perjanjian ini dibuat atas dasar kesepakatan bersama dan dibuat dengan 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu berada pada Pihak Pertama yang lainnya berada pada Pihak Kedua, dengan disaksikan oleh saksi-saksi.

Desa Ujung Padang, 01 Nopember 2000

PIHAK PERTAMA

Zaharudin
Zaharudin
Ketua



Dandius
Dandius
Sekretaris

PIHAK KEDUA

Saksi :

- 1. Hadis. YS.
- 2. M. Darwis
- 3. Arpan Anuar
- 4. Sukarna
- 5.
- 6.
- 7.

1. *M. Darwis*

2. *Arpan Anuar*

3.

4. *Sukarna*

5.

6.

7.

Lampiran 7. Instruksi Bupati Mukomuko Nomor; 2 Tahun 2013, Tentang Kebun Masyarakat Desa, tanggal 22 Februari 2013.



BUPATI MUKOMUKO
INSTRUKSI BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
KEBUN MASYARAKAT DESA

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Desa.
4. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Kepada : Kepala Desa

Memperhatikan :

Surat General Manager PT. Agro Muko tanggal 15 Februari 2013 Perihal Kebun Masyarakat Desa.

Atas Dasar tersebut diatas di instruksikan kepada saudara sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kebun Masyarakat Desa agar tetap bekerja sama dengan PT. Agro Muko guna menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat desa yang menjadi anggota KMD.
2. Ketentuan kerjasama Kebun Masyarakat Desa dengan PT. Agro Muko agar ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya guna efektivitas dan efisiensi pengelolaan KMD.

Demikian intruksi ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mukomuko
Pada Tanggal 22 Februari 2013

BUPATI MUKOMUKO,

ICHWAN YUNUS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko;
3. General Manager PT. Agro Muko;
4. Camat Se-Kabupaten Mukomuko.